



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3707/BP/PW1.1.1/IX/2025 Jakarta, 08 September 2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara

Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Jalan Bhayangkara, Sofifi, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal berikut:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dimaksudkan untuk:
 - memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperoleh nilai sebesar **75,00 atau BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,65	75,00
Predikat			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)



No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia namun terdapat kondisi bahwa beberapa data dukung yang belum dilampirkan sebagai pedoman teknis perencanaan kerja yaitu SK SEKMA 878 Tahun 2022, SK SEKMA no.2049 Tahun 2022, Permenpan 88 tahun 2021 Juknis Anggaran
2.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, namun terdapat kondisi antara lain bahwa belum terpenuhi seluruh ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) dengan kriteria SMART di mana terdapat Indikator Kinerja "Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" pada Sasaran Strategis 1 bukan murni menggambarkan kinerja organisasi karena pengukurannya dipengaruhi faktor eksternal diluar kontrol instansi antara lain pengajuan kasasi merupakan hak para pencari keadilan
3.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun terdapat kondisi bahwa data dukung yang dilampirkan belum menginformasikan kinerja yang telah dicapai.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun terdapat kondisi bahwa data dukung tidak menunjukkan semua pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi aplikasi misalnya atas indeks kepuasan masyarakat.
2.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun terdapat kondisi bahwa baperjakat yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan hasil penilaian kinerja dari aparatur yang bersangkutan misalnya hanya berdasarkan riwayat jabatan yang diemban sebelumnya tanpa menambahkan pertimbangan atas penilaian kinerja saat melaksanakan penugasaan pada jabatan sebelumnya.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen LKjIP belum menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja yang menjelaskan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
2.	Dokumen LKjIP belum menginformasikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra).
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas telah dibuat, namun penyusunannya belum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.



Rekomendasi	
No	
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dalam Dokumen Perencanaan Kinerja khususnya terkait pedoman teknis perencanaan kerja berikutnya agar dilengkapi dengan ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kerja antara lain: SK SEKMA Nomor 878 Tahun 2022, SK SEKMA Nomor 2049 Tahun 2022, Permenpan Nomor 88 tahun 2021 Juknis Anggaran.
2.	IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ada pada Pengadilan Tingkat Banding adalah IKU yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga atas IKU yang dinilai belum memenuhi kriteria SMART agar dilakukan pengusulan perubahan IKU "Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" kepada Mahkamah Agung karena pencapaian IKU tersebut sangat bergantung pada faktor eksternal diluar kontrol instansi.
3.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun terdapat kondisi bahwa data dukung yang dilampirkan belum menginformasikan kinerja yang telah dicapai.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar seluruh pengukuran capaian kinerja memanfaatkan teknologi aplikasi misalnya menambahkan data dukung berupa menggunakan aplikasi siSuper untuk mengukur kinerja indeks kepuasan masyarakat
2.	Agar mempertimbangkan penambahan penilaian hasil kinerja individu saat melakukan Pengukuran Kinerja yang menjadi dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional misalnya saat baperjakat dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai yang tertuang pada dokumen SKP.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar pada Bab III LKjIP menjelaskan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
2.	Dalam dokumen LKjIP agar menginformasikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra).
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2024, agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi seMAr (<https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr>). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi

Tembusan:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

